

# KONSEP DAN PERMASALAHAN PENDIDIKAN MORAL

**Ekbal Santoso**

**Abstrak :** Pendidikan adalah sarana untuk meningkatkan mutu manusia Indonesia, yaitu manusia Indonesia seutuhnya, artinya Pengetahuan, Mental dan Perilaku. Salah satu pendidikan adalah moral. Pendidikan Moral di Indonesia adalah pendidikan moral yang berdasarkan Pancasila. Hal ini berkaitan dengan dasar negara. Pendidikan Moral pendidikan yang mengarah terhadap perubahan perilaku baik dan buruk. Permasalahannya pendidikan moral tidak dapat berlangsung dengan baik, tanpa ketauladanan, perubahan yang ada di sekitar serta waktu yang diperlukan di dunia pendidikan.

**Kata kunci:** pendidikan, moral.

Banyak pemuka masyarakat, politik, dan pendidikan yang mengaku bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam upaya mentransmisikan nilai moral dan spiritual yang diperlukan untuk mengisi kehidupan di dunia, yang dewasa ini semakin kompleks. Sejauh ini hanya sebagian kecil dari sistem pendidikan yang telah menyelenggarakan pendidikan nilai semacam itu secara resmi. Salah satu kekurangan pendidikan moral adalah sering terjadinya ketidaksesuaian antara apa yang terucap dan apa yang diperbuat. Sejumlah pernyataan resmi mengenai tujuan pendidikan, mengaku betapa pentingnya upaya mengembangkan warga negara yang bertanggung jawab secara moral melalui lembaga-lembaga pendidikan formal. Dalam kenyataannya antara pernyataan resmi dengan aktualisasinya terdapat paradoks yang cukup tajam Keberadaan pendidikan moral tidaklah berdiri sendiri.

Pendidikan moral dilaksanakan dalam konteks tata nilai dan tata norma yang berlaku dalam masyarakat yang selalu mengalami perkembangan. Hal ini

mengandung kajian permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan moral. Apalagi bila kita lihat dalam kenyataan, adanya perbedaan ukuran tingkah laku moral, dalam hal ini tingkah laku moral yang baik atau buruk tidak dianut sama oleh manusia. Baik buruknya moral sangat dipengaruhi oleh subjektivitas individu dan masyarakat ataupun bangsa. Keadaan semacam ini pulalah yang membawa manusia pada lingkaran kesewenangan, keserakahan, ketidakadilan, kekejaman, sehingga tingkah lakunya berputar-putar di tempat tidak melaju sebagai mana perkembangan keilmuannya.

Dalam upaya mentransmisikan nilai-nilai moral dan siritual kepada individu, masa remajalah yang harus lebih banyak mendapat perhatian. Pernah kita mendengar adanya dekadensi moral, terutama di kalangan generasi muda. Mereka sering mendapat predikat sebagai pemuda agresor, pemberontak, sering bertindak tanpa perhitungan dan pertimbangan baik buruknya. Suatu contoh konkrit yang pernah terjadi misalnya perkelahian antar remaja di berbagai sekolah, murid menggeroyak gurunya, remaja mabuk-mabukan di jalanan, kumpul kebo di berbagai kalangan, bahkan pelakunya banyak dari kalangan mahasiswa. Hal ini menunjukkan adanya dekadensi moral yang dalam skala nasional dapat menggoyahkan berbagai sendi kehidupan. Oleh karena itu pendidikan moral sangat diperlukan, bukan hanya ditujukan pada generasi muda melainkan pada seluruh bangsa atau warga negara Indonesia, sebab masalah moral adalah tanggungjawab semua warga negara.

Hal-hal lain yang menjadi alasan pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan pentingnya pendidikan moral diberikan dalam pendidikan formal ataupun informasi antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; Kemajuan IPTEK tanpa diikuti dengan pembangunan moral atau sikap mental akan berdampak negatif dalam kehidupan. Suatu contoh penemuan senjata-senjata mutakhir yang bila digunakan dapat menghancurkan kehidupan manusia, sangat membutuhkan pertimbangan-pertimbangan moral yang kuat untuk mampu menahan diri bagi suatu penguasa atau negara untuk tidak mempergunakan hasil-hasil yang dicapai dari kemajuan IPTEK untuk kesejahteraan manusia. Di sinilah letak pentingnya pendidikan moral diberikan secara terencana untuk mengembangkan kesadaran moral dan mengimbangi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.

Kedua, menurunnya nilai-nilai tradisional yang positif. Secara umum terjadi keraguan moral dalam mengikuti perkembangan dunia. Misalnya menurunnya rasa kekeluargaan, kesetiakawanan, kegotongroyongan dan sebaliknya meningkatnya rasa individualis pada diri manusia. Menurunnya rasa hormat terhadap nilai-nilai yang bersifat spiritual dan meningkatnya penghargaan terhadap nilai-nilai yang bersifat material tanpa batas, telah mengakibatkan diabaikannya

nilai-nilai yang bersifat manusiawi. Oleh karena itu banyak nilai-nilai umum (universal) yang harus ditemukan kembali oleh manusia.

Ketiga, bertambah kompleksnya moral dalam perkembangan dunia yang melaju; Dalam menghadapi era globalisasi ini sangat deras masuknya pengaruh kebudayaan dari luar yang tak mungkin dapat dihindari dan termasuk di dalamnya nilai-nilai moral. Diharapkan siswa-siswa dapat membuat keputusan-keputusan yang kompleks terhadap masalah-masalah moral yang dihadapinya. Mereka harus dibantu dalam mengembangkan kemampuan menentukan pilihan-pilihan moral dalam berbagai situasi dan kondisi.

### KONSEP PENDIDIKAN MORAL DI INDONESIA

Kalau ada suatu pengertian yang secara fundamental sulit untuk didefinisikan, maka hal itu adalah pendidikan moral. Istilah pendidikan moral tidak selalu menunjukkan pengertian yang sama di setiap negara. Secara etimologis moral berasal dari bahasa Latin *mos* (jamak, *mores*) yang berarti tata cara, adat-istiadat atau kebiasaan, kata moral mempunyai arti sama dengan kata *ethos* (Yunani) yang menurunkan kata etika. Dalam bahasa Arab sama dengan akhlak yang berarti budi pekerti, dalam bahasa Indonesia sama dengan kesusilaan artinya ajaran tentang baik-buruk perbuatan dan kelakuan. Ada lagi negara yang memberikan pengertian moral adalah nilai-nilai atau civics. Di negara lain pendidikan moral disamakan dengan pendidikan agama. Agama memang mengandung unsur-unsur moral. Dari kenyataan tersebut dapat kita lihat bahwa keduanya mempunyai bidang garapan yang sama yaitu bidang sikap, perasaan dan nilai-nilai dari manusia.

Lalu apa yang dimaksud pendidikan moral ? Pada dasarnya pendidikan moral merupakan suatu usaha yang sadar untuk membantu seseorang agar dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan serta kepribadiannya secara utuh sehingga terbentuk suatu sikap dan tingkah laku moral yang baik atau budi pekerti yang baik (Mulyo Suseno, 1986:56). Dalam kaitannya dengan sistem pendidikan nasional kita, pendidikan moral adalah pendidikan moral Pancasila yang mencakup nilai-nilai, norma, sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan dasar falsafah Pancasila.

Peiaksanaan pendidikan moral Pancasila ini harus berlangsung secara terus menerus. Ini berarti bahwa pendidikan moral Pancasila sebagaimana pendidikan moral pada umumnya harus berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat dan pemerintah.

Sebagai acuannya (A. Suyitno, 1984:73) pendidikan moral harus mencakup keseluruhan kegiatan yang dapat membantu siswa atau seseorang untuk (a)

mengembangkan personal yang diinginkan, kebiasaan-kebiasaan sosial dan kecakapan-kecakapan yang berhubungan dengan kebersihan, kejujuran, ketelitian akan waktu, kerja sama, disiplin dan percaya pada diri sendiri, (b) mengembangkan atribut-atribut sosial seperti simpati, kebaikan hati, patriotisme, toleransi, kebenaran umum, menghormati individu dan jiwa demokratis, (c) memperkuat pengetahuan prinsip-prinsip moral dan mengembangkan kemampuan atau kesiapan membuat pertimbangan-pertimbangan moral, (d) menemukan hakikat kehidupannya, memperoleh kedamaian diri dan mengembangkan kekuatan watak.

Jika hal ini dapat dilakukan secara optimal maka akan dapat dicapai tujuan pendidikan moral Pancasila yaitu perkembangan kepribadian anak seutuhnya baik fisik, mental, emosional dan aspek-aspek spiritual sehingga mampu bersikap dan bertindak laku sebagaimana dalam tujuan pendidikan nasional yakni menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, disiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.

Konsep pendidikan moral seharusnya memasuki kegiatan dan pengajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah yang bertujuan untuk membantu anak menjadi makhluk manusia yang baik. Dalam skop yang luas, pendidikan moral harus mendidik manusia "menjadi manusia (Mulyo Suseno, 1986: 62).

## PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MORAL DI INDONESIA

Pada mulanya pendidikan moral tersirat dalam pemberian contoh-contoh kelakuan baik, penanaman kebiasaan yang baik pada anak-anak. Dapat dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia sebelum merdeka tidak melalakan pendidikan moral. Pendidikan moral diintegrasikan pada mata pelajaran lain dan merupakan mata pelajaran budi pekerti.

Perkembangan pendidikan moral melalui pendidikan agama atau melalui budi pekerti secara formal di sekolah terhenti secara resmi setelah diperkenalkannya mata pelajaran civics pada tahun 1957. Materi pelajaran civics berisi tentang sejarah nasional, sejarah proklamasi, UUD 1945 dan pidato-pidato kenegaraan serta pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa.

Pada tahun 1962 istilah civics diterjemahkan menjadi kewargaan negara, dengan tujuan utama mewujudkan terbentuknya warga negara yang baik. Keadaan ini berlangsung terus sampai tahun 1968, yaitu saat diberlakukannya kurikulum 1968. Materi pokok pelajaran kewargaan negara adalah Pancasila, UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPRS dan pengetahuan tentang PBB.

Dengan munculnya kurikulum 1968 ada wadah baru bagi pendidikan moral dengan nama pendidikan kewargaan negara. Tujuan utamanya: (a) menanam,

memupuk, mengembangkan rasa beragama dengan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan saling menghormati sesama insan beragama, (b) memupuk dan mengembangkan rasa kekeluargaan, (c) memupuk dan mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa, cinta tanah air dan bangsa, (d) memupuk dan mengembangkan anak didik untuk menjadi warga negara yang demokratis, cakap dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa dan negara, (e) menanam, memupuk dan mengembangkan sikap kewiraan.

Mulai tahun 1973 merupakan babak baru bagi pendidikan moral di Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan dalam GBHN (Tap MPR No. IV/MPR/1973) antara lain, (a) pendidikan didasarkan pada falsafah negara Pancasila dan (b) kurikulum di setiap tingkat pendidikan harus berisikan pendidikan moral Pancasila.

## HUBUNGAN PENDIDIKAN MORAL DI INDONESIA DENGAN DASAR NEGARA PANCASILA

Dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, khususnya dalam Bab IV huruf D, mengenai agama dinyatakan dalam butir 1, memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan perundangan tidak bertentangan dengan moral agama. Kemudian dalam Bab IV huruf E mengenai pendidikan dinyatakan dalam butir 2, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga kependidikan mampu berfungsi secara optimal terutama dalam meningkatkan pendidikan watak dan budipekerti agar dapat mengembalikan wibawa dan tenaga kependidikan. Selanjutnya pada visi dan misi GBHN Indonesia tahun 1999 digariskan bahwa pengamalan Pancasila perlu dilakukan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan diwujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia.

Dalam pasal 39 ayat 1 UU No. 2/1989, bahwa kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat (a) Pendidikan Pancasila, (b) Pendidikan Agama, dan (c) Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya pada penjelasan ayat 2 pasal 39 dinyatakan bahwa pendidikan pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari

Dari kutipan GBHN tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan budi pekerti, pendidikan moral yang diusahakan adalah dalam rangka melaksanakan pendidikan Pancasila yang hendak menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak didik sehingga nilai-nilai itu dapat dihayati dan menjadi sikap hidup yang dinyatakan dalam tingkah lakunya sehari-hari.

Pendidikan moral ini merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Adanya pendidikan moral bukanlah barang baru. Hal ini tersirat dalam tujuan pendidikan dan pengajaran yang dirumuskan dalam pasal 3 UUD No.4 tahun 1950 juncto UU No. 12 tahun 1954. Dalam pasal tersebut perlunya pendidikan moral tersirat dalam tujuan pendidikan antara lain membentuk manusia susila.

Manusia susila mempunyai makna yang sama dengan manusia yang mempunyai sikap dan nilai moral yang luhur. Nilai moral yang luhur dalam konteks Indonesia tidak lain adalah nilai-nilai yang dijabarkan dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

## **PROBLEMATIKA DALAM PENDIDIKAN MORAL.**

Banyak hal yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia di bidang pendidikan moral. Masalah-masalah itu harus diatasi apabila ingin mencapai misi yang diemban pendidikan moral. Beberapa hal yang menjadi masalah dalam pendidikan moral adalah :

### **Paradoksal antara Ajaran Moral dan Praktek Moral**

Yang dimaksud adalah terdapatnya perbedaan antara apa yang diajarkan sebagai suatu yang baik dengan apa yang dilakukan. Sebagai contoh nilai gemar melakukan kegiatan kemanusiaan sebagai salah satu dari nilai moral yang baik dilakukan, tetapi dalam kenyataannya masih sangat sedikit manusia Indonesia yang mau melakukan kegiatan kemanusiaan. Pendidikan moral mengajarkan keadilan, akan tetapi masih banyak terdapat perbuatan yang justru menimbulkan ketidakadilan terhadap sesama manusia.

### **Strategi Belajar Mengajar**

Pendidikan moral sebagai pendidikan nilai-nilai menuntut dipergunakannya strategi belajar mengajar yang cocok. Dalam praktek pengajaran kenyataan menunjukkan bahwa strategi belajar yang dipergunakan tidak dapat menunjukkan munculnya penalaran moral yang amat bermanfaat bagi terbentuknya manusia yang otonom dari segi moral.

## **Ketidakkemampuan Guru**

Adanya ketidakmampuan guru-guru pendidikan moral yang secara efektif menterjemahkan permasalahan-permasalahan moral yang ada ke dalam program pendidikan moral. Akibatnya banyak kegiatan praktis dalam pendidikan moral hanya diberikan yang secara teoritis dan dapat dikatakan dangkal.

## **Pendidikan Moral Membutuhkan Jangka Waktu Panjang untuk Diinternalisasikan**

Pendidikan moral sebagai pendidikan nilai-nilai membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat diinternalisasikan nilai-nilai yang kemudian menjadi sikap dan perilaku seperti yang diharapkan. Keterbatasan waktu yang tersedia menuntut untuk dapat mengadakan evaluasi, padahal proses internalisasi masih berlangsung.

## **Sampai Sekarang Implementasinya Kurang Memadai.**

Hal ini nampak bahwa waktu yang diberikan kurang memadai, seperti yang tercantum pada GBPP (Garis Besar Pokok Pengajaran) yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 jam pelajaran per minggu (90 menit) dan Pendidikan Agama 2 jam pelajaran. Demikianlah beberapa persoalan yang ada dalam pendidikan moral yang perlu kita gumuli bersama. Adanya persoalan itu menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan moral tidak hanya bergantung pada prosesnya sendiri, melainkan banyak faktor lain yang mempengaruhinya. Oleh karena itu perlu diketahui dan dicari alternatif pemecahannya agar tujuan pendidikan moral dapat dicapai secara optimal.

## **ALTERNATIF PEMECAHAN.**

Sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul sebagaimana yang kami sebutkan di atas, kami mencoba memberikan beberapa alternatif pemecahannya adalah sebagai berikut. Pertama, dengan adanya paradoksal antara pengajaran moral dan praktek moral maka perlu adanya pendidikan pengembangan subyek didik agar anak bisa bertindak sesuai dengan ajaran moral. Dengan demikian pendidikan moral bukan hanya sekedar upaya melatih keterampilan-keterampilan tertentu agar bertindak dengan cara tertentu. Akan tetapi pendidikan tersebut juga harus mencakup upaya membekali subyek didik agar mampu memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip moral dalam berbagai situasi dan kondisi serta eksistensi manusia.

Kedua, perlu adanya revisi strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar pendidikan moral perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dari strategi yang digunakan mampu memunculkan penalaran moral. Ini berarti strategi belajar mengajar dituntut menggunakan berbagai macam metode dan pendekatan untuk mengemban misinya. Misal penggunaan metode filosofis untuk menyikapi berbagai masalah ataupun isu moral. Filsafat moral dapat dijadikan komponen teoritis maupun esensial moral.

Ketiga, guru-guru pendidikan moral harus selalu berupaya membekali dan melengkapi dirinya dengan berbagai kepustakaan dalam dunia moral yang menawarkan ide-ide fundamental untuk memahami situasi moral. Hal ini akan bermanfaat bagi guru pendidikan moral untuk dapat menterjemahkan permasalahan-permasalahan moral yang ada dalam program pendidikan moral.

Keempat, moralitas merupakan serangkaian nilai tingkah laku yang baik dan luhur yang membutuhkan waktu panjang agar dapat diinternalisasikan. Oleh sebab itu perlu ditransmisikan.

## PENUTUP

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pendidikan moral dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam hal ini nilai-nilai sila dalam Pancasila menjadi materi pokok yang diajarkan yang dapat digunakan sebagai filter dan penangkal terhadap berbagai macam pengaruh dan gejolak lingkungan hidup yang bersifat negatif.

Kedua, pendidikan moral bukanlah masalah yang mudah. Seringkali guru terjebak pada permasalahan apakah pendidikan moral hanya menyangkut pengajaran tentang afeksi tanpa adanya pengaruh dan perubahan pada pribadi subyek didik dan apakah pendidikan moral dapat meningkatkan kualitas manusia Indonesia? Oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah yang bervariasi dalam proses belajar mengajar. Juga perlu adanya keteladanan dan dukungan kondisi keluarga serta lingkungan kemasyarakatan yang sehat. Dengan demikian pendidikan moral menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Ketiga, pendidikan moral dalam mengembangkan misinya banyak menemui hambatan dan tantangan termasuk di dalamnya menyangkut permasalahan moral itu sendiri. Untuk itulah secepatnya perlu dicari dan ditetapkan jalan pencegahannya agar pendidikan moral mampu menjalankan fungsinya secara konsisten dan konsekuen. Hal ini pun menjadi tanggung jawab bersama antar berbagai pihak.

Keempat, pendidikan moral menjadi sangat penting pada masa dewasa ini. Dikatakan demikian karena menyangkut berbagai pertimbangan dan alasan pemikiran. Kemajuan IPTEK tanpa diikuti pembangunan moral akan menimbulkan dampak negatif dalam berbagai lapangan kehidupan. Nilai-nilai tradisional yang positif akan tergeser kedudukannya seiring dengan keragu-raguan mengambil sikap atas perkembangan dunia yang dihadapinya.

Kelima, pendidikan moral bertujuan untuk membentuk perkembangan kepribadian anak secara optimal baik fisik, mental, emosional dan aspek-aspek spiritual. Di harapkan anak mampu bersikap dan bertindak laku sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yakni menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, kepribadian, disiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggungjawab, mandiri, cerdas, dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani.

## DAFTAR RUJUKAN

- Suyitno. 1984. *Konsep PMP sebagai Pendidikan Nilai-Nilai*. Jakarta: Depdikbud-Dirjen Dikti.
- Mulyo Suseno. 1986. *Pendidikan Budi Pekerti Di Rumah dan Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN. Surabaya: Apollo
- UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Surabaya: Usaha Nasional
- Wayan Ardhana. 1986. *Dasar-Dasar Kependidikan Seumur Hidup*. Malang: IKIP Malang.
- WJS Poerwodarminto. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

# MODEL PEMBELAJARAN BERKELOMPOK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN BERFIKIR SISWA PADA BIDANG STUDI IPS

**Ekbal Santoso**

**Abstrak:** Belajar merupakan proses aktif yang disengaja dengan melibatkan pikiran, guna memperoleh suatu pemecahan masalah dan masalah tersebut dapat dimengerti. Ilmu Pengetahuan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan IPS merupakan bahan pelajaran yang berisikan perpaduan dari berbagai bidang ilmu, seperti Sejarah, Ekonomi, Geograsi, Sosiologi dan Antropologi. Tujuan dan pola pembelajaran IPS berkait erat dengan konteks permasalahan lingkungan masyarakat sekitar siswa, baik sebagai sumber belajar maupun sebagai media dan evaluasi yang harus disajikan secara *expanding community approach*. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang secara sadar dan sengaja menciptakan interaksi yang saling mengasihi antar sesama siswa. Dengan ciri: siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi; kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan akademik yang heterogen dan penghargaan lebih berorientasi kelompok daripada individu.

**Kata kunci:** pembelajaran kelompok, pemberdayaan berfikir.

Belajar merupakan proses aktif yang disengaja dengan melibatkan pikiran, guna memperoleh suatu pemecahan masalah dan masalah tersebut dapat dimengerti. Ilmu Pengetahuan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan IPS merupakan bahan pelajaran yang berisikan perpaduan dari berbagai bidang ilmu, seperti Sejarah, Ekonomi, Geograsi, Sosiologi dan Antropologi.

Tujuan dan pola pembelajaran IPS berkait erat dengan konteks permasalahan lingkungan masyarakat sekitar siswa, baik sebagai sumber belajar maupun sebagai media dan evaluasi yang harus disajikan secara *expanding community*